

## Strategi Kebijakan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Oleh:

<sup>1</sup>Ransta L. Lekatompessy; <sup>2</sup>Edoardus E. Maturbongs; <sup>3</sup>Hubertus Oja

<sup>13</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus

<sup>2</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus

Email. [ransta@unmus.ac.id](mailto:ransta@unmus.ac.id)

### Abstrak

Kebijakan pariwisata berbasis masyarakat adalah sebuah pendekatan yang berusaha memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya di suatu wilayah sambil meminimalkan kerusakan lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat lokal sebagai partisipan kunci dalam pengembangan destinasi pariwisata. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah studi literatur. Strategi kebijakan pariwisata berbasis masyarakat berfungsi sebagai solusi untuk mengoptimalkan potensi pariwisata dan memberdayakan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan pariwisata. Perumusan kebijakan ini mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan produk pariwisata lokal, pelibatan masyarakat dalam promosi dan pemasaran, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, serta menjaga sumber daya alam dan budaya. Dengan menerapkan strategi ini, bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan warisan alam dan budaya, serta mendorong pembangunan pariwisata yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah diharapkan dapat menyusun regulasi dan mengalokasikan anggaran yang memadai, memfasilitasi pembentukan kelembagaan pariwisata lokal, dan meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain. Disisi lain, bagi Pelaku Usaha Pariwisata, untuk senantiasa giat membangun kemitraan dengan masyarakat, memberikan peluang keterlibatan masyarakat, menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan, dan berpartisipasi dalam promosi pariwisata berbasis masyarakat. Disamping itu, Masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi, melestarikan kearifan lokal, membentuk organisasi pariwisata, mengembangkan keterampilan dan kreativitas, serta berperan aktif dalam promosi pariwisata berbasis Masyarakat.

**Kata Kunci: Strategi Kebijakan, Implementasi Strategi**

---

### Abstract

*Community-based tourism policy is an approach that seeks to maximize the utilization of natural and cultural resources in an area while minimizing environmental damage. This approach aims to involve local communities as key participants in the development of tourism destinations. The research method used for this research is a literature study. The community-based tourism policy strategy serves as a solution to optimize tourism potential and empower local communities in tourism planning, management, and development. The formulation of this policy includes community capacity building, local tourism product development, community involvement in promotion and marketing, collaboration with stakeholders, and safeguarding natural and cultural resources. By implementing this strategy, it aims to build and improve community welfare, preserve natural and cultural heritage, and encourage equitable, inclusive and sustainable tourism development. The government is expected to formulate regulations and allocate adequate budgets, facilitate the formation of local tourism institutions, and increase cooperation with other stakeholders. On the other hand, for Tourism Business Actors, to always be active in building partnerships with the community, providing opportunities for community involvement, applying sustainable tourism principles, and participating in community-based tourism promotion. In addition, the community is expected to be able to increase awareness and participation, preserve local wisdom, form tourism organizations, develop skills and creativity, and play an active role in community-based tourism promotion.*

**Keywords: Policy Strategy; Strategy Implementation**

---

## PENDAHULUAN

Strategi Kebijakan Pariwisata Berbasis Masyarakat merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan budaya yang ada di suatu daerah tanpa merusak ekosistem lingkungan. Dalam konteks ini, kebijakan pariwisata berbasis masyarakat bertujuan untuk melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengembangan destinasi pariwisata. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal, tradisi, serta potensi alam dan budaya setempat sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang tepat, masyarakat lokal dapat terlibat aktif dalam mengelola dan mempromosikan potensi lokal, termasuk dalam bidang kuliner tradisional, pemanfaatan bahan baku lokal, dan promosi melalui media sosial dan pameran kuliner. Dengan demikian, kebijakan pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan budaya lokal (Murni, 2023).

Pengelolaan sektor pariwisata di daerah masih belum optimal dan cenderung kurang melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Lokal, dalam banyak kasus, pengembangan pariwisata masih didominasi oleh investor dan pihak swasta, sementara masyarakat lokal kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengelolaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pitana dan Gayatri (2021), kurangnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian manfaat ekonomi pariwisata dan meningkatkan risiko konflik dengan masyarakat setempat.

Dalam beberapa kasus, pengembangan pariwisata yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya setempat. Studi yang dilakukan oleh Sunaryo (2018) menyoroti bahwa kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan erosi budaya (Sunaryo, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan et al. (2019) menunjukkan bahwa pariwisata yang hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek dan tidak melibatkan masyarakat lokal cenderung tidak berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dapat memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang (Hermawan et al., 2019).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, terlihat Studi yang dilakukan oleh Putri et al. (2019) di Kawasan Lembah Gunung Pancar, Bogor, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat lokal secara signifikan. Namun, dalam banyak kasus, manfaat ekonomi pariwisata masih belum dirasakan secara merata oleh masyarakat setempat. Disamping itu, pentingnya pelestarian kearifan lokal dan budaya, sesuai penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) di Desa Wisata Bedulu, Bali, menemukan bahwa ketika masyarakat lokal terlibat dalam pengelolaan pariwisata, mereka cenderung lebih berperan dalam melestarikan kearifan lokal, tradisi, dan budaya setempat sebagai daya tarik wisata.

Berdasarkan situasi di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengembangan pariwisata menjadi sangat penting untuk menjamin

keberlanjutan pariwisata, mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan kearifan lokal.

#### **METODE PENELITIAN**

Studi literature/kepuustakaan (*Library research*) menjadi dasar dari artikel ini, dengan melakukan kajian terhadap artikel jurnal, serta literatur-literatur yang dipublikasikan. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu pembahasan dan penjelasan keadaan serta permasalahan, selanjutnya mencoba untuk menganalisa secara logis, sistematis, dan konsisten dengan mengkaji secara rinci dan mendalam berkaitan dengan masalah tersebut.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pariwisata Berbasis Masyarakat**

Pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) merupakan suatu konsep pengembangan pariwisata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan pariwisata di wilayah mereka (Sunaryo, 2018). Konsep ini menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan pariwisata, bukan hanya sebagai objek semata. Menurut Hausler (2018), pariwisata berbasis masyarakat memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu: 1) Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengembangan pariwisata; 2) Kepemilikan dan kontrol masyarakat terhadap operasi dan manajemen pariwisata; 3) Pembagian keuntungan/manfaat secara adil kepada Masyarakat; 4) Pemanfaatan sumber daya pariwisata secara berkelanjutan; 5) Penghargaan terhadap budaya dan tradisi masyarakat lokal (Hausler, 2018).

Konsep pariwisata berbasis masyarakat ini memberikan beberapa manfaat, antara lain (Pitana & Gayatri, 2021): Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal; Melestarikan kekayaan alam, budaya, dan warisan Masyarakat; Mendorong pemberdayaan dan partisipasi Masyarakat; Mempromosikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pariwisata berbasis masyarakat membutuhkan keterlibatan aktif dan kemitraan antara masyarakat lokal, pemerintah, swasta, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya (Hermawan et al., 2019). Selain itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan produk wisata lokal, promosi dan pemasaran yang melibatkan masyarakat, serta perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya (Putri, E. K. et al., 2019). Dengan menerapkan konsep pariwisata berbasis masyarakat, diharapkan dapat menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, serta melestarikan kekayaan alam dan budaya setempat (Sunaryo, 2018).

Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism/ CBT*) merupakan konsep pengembangan kepariwisataan yang berkesesuaian dengan pariwisata berkelanjutan. Konsep tersebut mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya, sehingga implementasinya mampu mendukung tercapainya tiga pilar keberlanjutan (*the three pillars of sustainability*) yaitu keberlanjutan di bidang ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan (Asker et al, 2010). *Community Based Tourism* adalah salah satu konsep dari pariwisata alternatif yang mana

memberikan dampak yang lebih positif dalam pengelolaannya dibanding pariwisata masal yang sifatnya konvensional. *Community Based Tourism* merupakan konsep yang dikelola atau dipraktikkan oleh suatu komunitas dan untuk komunitas. Manniyar Ayu Anggraeni, Farida Rahmawati (2021)

## **Analisis Strategi Kebijakan Pariwisata Berbasis Masyarakat**

### **1 Perumusan Strategi Kebijakan**

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan potensi pariwisata. Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan pariwisata di wilayahnya (Sunaryo, 2018). Adanya keterlibatan masyarakat, mereka akan mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari kegiatan pariwisata dan merasa memiliki atas aset-aset pariwisata di daerahnya (Putri, E. K. et al., 2019).

Masyarakat masih kurang mendapatkan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dan kurang merasa memiliki terhadap aset-aset pariwisata di wilayahnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi kebijakan pariwisata berbasis masyarakat yang dapat mengoptimalkan potensi pariwisata dan memberdayakan masyarakat lokal. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan kekayaan alam dan budaya setempat, serta mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan (Hermawan et al., 2019). Dalam perumusan strategi kebijakan pariwisata berbasis masyarakat, perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat adat, pelaku usaha pariwisata, akademisi, dan LSM terkait. Hal ini bertujuan agar strategi kebijakan yang dirumuskan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dan memastikan pembangunan pariwisata yang adil, inklusif, dan berkelanjutan (Pitana & Gayatri, 2021).

Perumusan strategi kebijakan pariwisata berbasis masyarakat bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pariwisata yang dimiliki daerah tersebut dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, melestarikan kekayaan alam dan budaya, serta mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan (Sunaryo, 2018). Upaya peningkatan kapasitas masyarakat menjadi strategi utama dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola pariwisata (Hermawan et al., 2019). Pembentukan kelompok-kelompok sadar wisata di tingkat desa/kampung juga penting untuk mengkoordinir kegiatan pariwisata (Putri, E. K. et al., 2019).

Pengembangan Produk Wisata Lokal merupakan strategi selanjutnya dalam mengembangkan produk-produk wisata yang unik dan menarik dengan memanfaatkan kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal masyarakat (Pitana & Gayatri, 2021). Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan paket-paket wisata seperti wisata perkampungan adat, jelajah hutan, berkemah di pantai, festival budaya, dan wisata kuliner. Dalam proses ini, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan produk wisata yang dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai dan kearifan lokal (Putri, E. K. et al., 2019).

Promosi dan Pemasaran yang melibatkan masyarakat merupakan strategi yang efektif serta sangat diperlukan untuk mempromosikan pariwisata berbasis masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim promosi yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha pariwisata (Sunaryo, 2018). Pemanfaatan media sosial, website, dan platform digital juga penting untuk menjangkau pasar yang lebih luas (Hermawan et al., 2019). Selain itu, partisipasi dalam pameran wisata dan membangun kemitraan dengan biro perjalanan wisata dapat mendukung upaya promosi dan pemasaran (Pitana & Gayatri, 2021).

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat membutuhkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, akademisi, LSM, dan masyarakat adat (Sunaryo, 2018). Kemitraan ini bertujuan untuk menyinergikan program-program pengembangan pariwisata dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pendukung dan regulasi yang mendukung pariwisata berbasis masyarakat sangat penting (Putri, E. K. et al., 2019). Selain itu, kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan dapat membantu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pariwisata (Hermawan et al., 2019).

Strategi terakhir dalam kebijakan pariwisata berbasis Masyarakat adalah melindungi sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik wisata dari eksploitasi berlebihan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan dan regulasi yang melindungi kelestarian sumber daya tersebut (Hermawan et al., 2019). Pelibatan masyarakat adat dalam upaya pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal juga sangat penting (Pitana & Gayatri, 2021). Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme pembagian manfaat yang adil dari kegiatan pariwisata untuk mendukung konservasi sumber daya alam dan budaya (Putri, E. K. et al., 2019). Edukasi bagi wisatawan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan budaya setempat juga perlu dilakukan (Hermawan et al., 2019).

Dalam proses perumusan kebijakan kepariwisataan, keterlibatan masyarakat lokal memegang peranan yang sangat penting. Masyarakat lokal adalah pihak yang paling mengerti tentang kondisi, budaya, dan kebutuhan daerah mereka sendiri. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan kepariwisataan dapat dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya menguntungkan sektor pariwisata itu sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Salah satu contoh keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan kepariwisataan adalah melalui konsultasi publik atau forum diskusi. Dalam forum-forum ini, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap rencana kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat (Rasoolimanesh et al., 2019). Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat dilakukan melalui pembentukan organisasi atau kelompok masyarakat yang khusus menangani isu-isu kepariwisataan. Organisasi ini dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam proses perumusan kebijakan (Saufi et al., 2019).

Pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan kepariwisataan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih berkelanjutan dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini akan mencegah terjadinya konflik antara masyarakat dan pelaku pariwisata, serta



memastikan bahwa pariwisata dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak (Gupta & Bakshi, 2021).

## **2. Implementasi Strategi Kebijakan**

Implementasi strategi kebijakan pariwisata berbasis masyarakat merupakan tahap penting untuk mewujudkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal. Pembentukan lembaga atau organisasi pariwisata di tingkat lokal yang melibatkan masyarakat sebagai pengelola menjadi langkah awal yang penting. Lembaga ini bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan mengelola kegiatan pariwisata berbasis masyarakat (Sunaryo, 2018). Contohnya adalah pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang khusus menangani pariwisata (Putri, E. K. et al., 2019).

Pemerintah daerah berperan penting dalam menyediakan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, transportasi, fasilitas umum, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pariwisata berbasis masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pariwisata juga perlu dilakukan (Hermawan et al., 2019). Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola pariwisata berbasis masyarakat. Pelatihan dapat mencakup aspek pengelolaan usaha, pelayanan wisatawan, pemandu wisata, keterampilan produksi kerajinan, dan lain-lain (Pitana & Gayatri, 2021). Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan ini (Sunaryo, 2018).

Berbagai contoh empiris menunjukkan bahwa pariwisata berbasis masyarakat telah memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan pelestarian sumber daya alam serta budaya setempat. Salah satu contoh empiris yang dapat dilihat adalah Desa Wisata Pentingsari di Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Suryawan (2019) menunjukkan bahwa desa tersebut telah mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan atraksi wisata, akomodasi, dan penyediaan jasa wisata lainnya. Hasilnya, pendapatan masyarakat meningkat hingga 30% dibandingkan sebelum adanya pariwisata berbasis masyarakat (Suryawan, 2019).

Di Bogor, Kawasan Lembah Gunung Pancar juga telah mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan atraksi wisata alam, perkemahan, dan kegiatan petualangan (Putri, E. K. et al., 2019). Masyarakat berperan dalam pengambilan keputusan dan pembagian manfaat ekonomi pariwisata, meskipun masih terdapat kendala dalam hal kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Contoh lain dapat dilihat di Desa Wisata Bedulu, Bali, yang berhasil mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan atraksi wisata budaya, akomodasi, dan kerajinan tangan (Putra, 2020). Masyarakat juga terlibat dalam pelestarian kearifan lokal dan tradisi sebagai daya tarik wisata, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal pemasaran dan promosi yang belum optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Pitana dan Gayatri (2021) di Desa Wisata Bali Aga, Bali, juga menemukan bahwa masyarakat lokal terlibat dalam pengelolaan atraksi wisata

budaya, akomodasi, dan kerajinan tangan, serta berperan dalam pelestarian warisan budaya dan tradisi sebagai daya tarik wisata. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal pengelolaan yang belum terorganisir dengan baik dan kurangnya pelatihan bagi masyarakat. Secara umum, contoh-contoh empiris tersebut menunjukkan bahwa pariwisata berbasis masyarakat telah memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal, seperti peningkatan pendapatan, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, dan pelestarian kearifan lokal serta sumber daya alam dan budaya. Namun, masih terdapat tantangan seperti promosi dan pemasaran yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan yang belum terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, implementasi strategi kebijakan pariwisata berbasis masyarakat membutuhkan komitmen dan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (Maturbongs, 2020). Dengan implementasi yang baik, diharapkan dapat menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, memberdayakan masyarakat, dan melestarikan kekayaan alam serta budaya .

### **3. Evaluasi Strategi Kebijakan**

Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan strategi kebijakan pariwisata berbasis masyarakat perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi perbaikan yang diperlukan. Partisipasi masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program (Putri, E. K. et al., 2019). Upaya promosi dan pemasaran pariwisata berbasis masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemanfaatan media sosial, website, dan platform digital dapat dioptimalkan untuk menjangkau pasar yang lebih luas (Hermawan et al., 2019). Kerjasama dengan biro perjalanan wisata, partisipasi dalam pameran wisata, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan promosi juga perlu dilakukan (Pitana & Gayatri, 2021).

Keberhasilan implementasi strategi kebijakan Pariwisata berbasis Masyarakat, ini tidak selalu mudah dicapai dan memerlukan evaluasi yang cermat. Salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat yang terbatas dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pariwisata (Giampiccoli et al., 2020). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki suara yang kuat dan dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam perumusan kebijakan pariwisata. Aspek lain yang perlu dievaluasi adalah pembagian manfaat ekonomi dari pariwisata. Salah satu tujuan utama CBT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui peluang ekonomi yang diciptakan oleh pariwisata. Namun, seringkali manfaat ekonomi ini tidak terdistribusi secara merata, dan hanya dinikmati oleh segelintir orang (Kausar & Nishikawa, 2021). Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan CBT dapat memberikan peluang ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, evaluasi juga harus menyoroti dampak sosial-budaya dari pariwisata berbasis masyarakat. Pariwisata dapat memberikan dampak positif seperti pelestarian budaya lokal dan peningkatan rasa bangga masyarakat. Namun, jika tidak dikelola dengan

baik, pariwisata juga dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya dan degradasi lingkungan (Hatipoglu et al., 2019). Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan CBT dapat membantu melestarikan warisan budaya dan lingkungan alami. Dalam melakukan evaluasi, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, operator pariwisata, dan organisasi non-pemerintah. Evaluasi partisipatif ini memungkinkan berbagai perspektif dan pengalaman dipertimbangkan, sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas strategi CBT (Salazar, 2020).

Secara keseluruhan, evaluasi strategi kebijakan pariwisata berbasis masyarakat merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang dari pariwisata bagi masyarakat lokal. Evaluasi ini harus dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa tujuan CBT tercapai.

### **KESIMPULAN**

Strategi kebijakan pariwisata berbasis masyarakat menjadi solusi untuk mengoptimalkan potensi pariwisata dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan pariwisata di wilayahnya. Perumusan strategi kebijakan ini mencakup aspek peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan produk wisata lokal, promosi dan pemasaran yang melibatkan masyarakat, kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta perlindungan sumber daya alam dan budaya. Implementasi strategi memerlukan pembentukan kelembagaan pariwisata lokal, pengembangan infrastruktur pendukung, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta promosi dan pemasaran yang berkelanjutan. Keberhasilan strategi ini bergantung pada komitmen dan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Implementasi strategi kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan kekayaan alam dan budaya, serta mendorong pembangunan pariwisata yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan kesimpulan di atas, diharapkan Strategi Kebijakan Pariwisata Berbasis Masyarakat dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga dapat mengoptimalkan potensi pariwisata, memberdayakan masyarakat lokal, serta mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Merujuk pada kesimpulan di atas, maka pemerintah diharapkan dapat menyusun regulasi dan mengalokasikan anggaran yang memadai, memfasilitasi pembentukan kelembagaan pariwisata lokal, dan meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain. Disisi lain, bagi Pelaku Usaha Pariwisata, untuk senantiasa giat membangun kemitraan dengan masyarakat, memberikan peluang keterlibatan masyarakat, menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan, dan berpartisipasi dalam promosi pariwisata berbasis masyarakat. Disamping itu, Masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi, melestarikan kearifan lokal, membentuk organisasi pariwisata, mengembangkan keterampilan dan kreativitas, serta berperan aktif dalam promosi pariwisata berbasis Masyarakat. Masih terbatasnya pembahasan dalam kajian ini, oleh karena itu diharapkan



kajian lebih mendalam tentang potensi dan peluang, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, mengkaji dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memberikan rekomendasi dan solusi praktis.

**DAFTAR PUSTAKA:**

- Giampiccoli, A., Saayman, M., & Jugmohan, S. (2020). Stakeholder views on community-based tourism and its role in poverty alleviation. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 30(2), 808–817.
- Gupta, M., & Bakshi, S. (2021). Community participation in tourism development: A case study of Praggur, India. *Journal of Ecotourism*, 20(2), 149–165.
- Hatipoglu, B., Ertuna, B., & Sasidharan, V. (2019). Evaluating the social and cultural impacts of community-based tourism development: A case study from Turkey. *Journal of Ecotourism*, 18(4), 359–376.
- Hausler, N. (2018). *Community-Based Tourism: Concept and Practice*. GIZ.
- Hermawan, H., Suprihatin, I. S., & Mulyawan, B. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kampung Wisata Situ Gede Bogor. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 338-347.
- Kausar, D. R., & Nishikawa, Y. (2021). Community-based tourism and local economic development: Expectations and realities from stakeholders' perspectives. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(12), 2037-2056.
- Maturbongs, E. E. (2020). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Merauke. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 55–63. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.866>
- Murni, N. (2023). Strategi Pengembangan Wisata Kuliner Desa Wisata Kampung Lama Kabupaten Deli Serdang Berbasis Potensi Lokal. *Tourism Hospitality and Culture Insights Journal*, 3(1), 80–87. <https://doi.org/doi:10.36983/thcij.v3i1.454>.
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2021). *Sosiologi Pariwisata: Kajian Kritis Penyelenggaraan Pariwisata Bali*. In Penerbit Andi.
- Putra, I. N. D. (2020). Dampak Pariwisata Berbasis Masyarakat terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Wisata Bedulu, Bali. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(4), 607–614.
- Putri, E. K., Soemarno, S., & Hakim, L. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Lembah Gunung Pancar, Bogor. *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, 4(1), 1–16.
- Rasoolimanesh, S. M., Roldán, J. L., Jaafar, M., & Ramayah, T. (2019). Factors influencing residents' perceptions toward tourism and their advocacy: An application of the Tri-Core Model. *Current Issues in Tourism*, 22(14), 22(14), 1687–1705.
- Salazar, N. B. (2020). Participatory evaluation of community-based tourism initiatives: A case study from Indonesia. *Critical Tourism Studies Proceedings*, 1, 134–138.
- Saufi, A., O'Brien, D., & Wilkins, H. (2019). Exploring the voice of stakeholders in the implementation of sustainable community-based tourism in rural areas in Indonesia. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(10), 1539–1556.
- Sunaryo, B. (2018). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia (Edisi Revisi)*. Gava Media.
- Suryawan, I. B. (2019). Dampak Pariwisata Berbasis Masyarakat terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Wisata Pentingsari, Yogyakarta. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 3(2), 121–134.